

Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Pusat dan Daerah

Khairani Alawiyah Matondang¹ Ainun Saskia² Khairunnisa Br Marpaung³ Ledi Marina Purba⁴ Kevin Daniel Sirait⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alawiyah@unimed.ac.id¹ ainunsaskianasution@gmail.com²

khairunisamarpaung@gmail.com³ ledimarinapurbaledi@gmail.com⁴ kevinrait9@gmail.com⁵

Abstract

One component of Indonesia's state financial reform, which attempts to improve accountability and openness in government financial management, is the adoption of an accrual-based accounting system. The difficulties and solutions for putting in place an accrual-based accounting system in both national and local governments are examined in this paper. Document studies, in-depth interviews, and observations are some of the information gathering methods employed in this qualitative research strategy. According to the study's findings, the biggest obstacles to putting this system into place include a lack of information technology infrastructure, a shortage of human resources, complicated regulations, and change aversion. Increasing human resource competency through training and certification, fortifying information systems and technology infrastructure, coordinating central and regional government regulations, boosting the dedication of regional head leadership, and routinely assessing the system's implementation are some of the primary strategies suggested to address these issues. It is envisaged that by putting these tactics into practice, accrual-based accounting would function more efficiently and promote sound governance.

Keywords: *Accrual-Based Accounting, Transparency, Accountability, Central Government, Local Government*

Abstrak

Salah satu komponen reformasi keuangan negara Indonesia yang berupaya meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Dalam makalah ini, kesulitan dan solusi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat dan daerah dikaji. Studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi merupakan beberapa metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam strategi penelitian kualitatif ini. Berdasarkan temuan penelitian, kendala terbesar penerapan sistem ini adalah kurangnya infrastruktur teknologi informasi, kekurangan sumber daya manusia, regulasi yang rumit, dan penolakan terhadap perubahan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan sistem informasi dan infrastruktur teknologi, koordinasi regulasi pemerintah pusat dan daerah, peningkatan dedikasi pimpinan daerah, dan penilaian rutin terhadap implementasi sistem merupakan beberapa strategi utama yang disarankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menerapkan taktik ini, diharapkan akuntansi berbasis akrual dapat berfungsi lebih efisien dan mendorong tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 2008 dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual (Inspektorat daerah Kota Magelang, 2015). Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan, akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa ekonomi

pada saat terjadinya tanpa memperhatikan waktu kas, sehingga memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan akurat tentang posisi keuangan pemerintah. Sebelum diterapkannya aturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang berlandaskan akrual, pemerintah daerah di Indonesia menggunakan metode pencatatan kas dengan sistem tata buku tunggal (Single Entry). Meskipun sistem pencatatan satu entri sangat mudah digunakan dan mudah dipahami, ada banyak kelemahannya (Risnansih, 2016). Sistem ini tidak memperhitungkan aset, utang, atau pendapatan yang masih dalam proses; hanya mencatat transaksi ketika uang masuk atau keluar. Dalam implementasinya, cara ini dianggap tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi keuangan pemerintah karena hanya fokus pada arus kas, bukan posisi keuangan secara keseluruhan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem ini mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas, sementara aset, utang, dan ekuitas dana diakui dengan basis akrual. R. Zelmianti (2015).

Perubahan dari sistem tata buku tunggal berbasis kas ke akuntansi akrual memiliki alasan yang kuat. Perubahan menuju akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan informasi yang disediakan oleh basis kas (Maryati, U. 2015). Salah satu pendorong utama perubahan tersebut adalah kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih jauh lagi, perubahan ini juga dimaksudkan untuk mendukung prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan informasi yang lebih transparan dan akuntabel, pengawasan atas penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif. Pengelolaan aset dan kewajiban menjadi lebih sistematis, sehingga pemerintah mampu merumuskan kebijakan fiskal yang lebih matang berdasarkan data yang valid. Perubahan ini sesuai dengan standar internasional, Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan sektor publik di seluruh dunia dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan investor bahwa pengelolaan keuangan negara beroperasi sesuai dengan standar yang lebih canggih dan jelas. Dengan berbagai keuntungan. Dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, diharapkan bahwa pemerintah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Dengan menggunakan sistem ini, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dapat dicatat dengan lebih akurat. Akibatnya, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan (Asfiansyah, A 2015). Selain itu, tujuan penggunaan akuntansi berbasis akrual adalah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Maula, F. 2017).

Namun demikian, ada banyak kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat dan daerah. Sumber daya manusia yang tidak memadai, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan budaya organisasi yang tidak berubah dari sistem lama adalah beberapa masalah utama yang dihadapi (Risnansih, 2016). Menurut Djbp Kemenkeu, banyak pegawai Kemenkeu hanya terbiasa dengan sistem akuntansi berbasis kas dan tidak memahami konsep akrual secara menyeluruh. Akibatnya, kesulitan mencatat transaksi keuangan yang memerlukan pengakuan hak dan kewajiban dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai juga merupakan hambatan. Akuntansi berbasis akrual membutuhkan sistem akuntansi dan IT yang lebih kompleks, yang membutuhkan dukungan teknologi yang besar. Namun, banyak pemerintah daerah masih menggunakan sistem manual atau tidak memiliki

infrastruktur IT yang memadai untuk melakukannya.(BINUS Accounting. 2017). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Kementerian Keuangan adalah pengembangan dan modernisasi sistem informasi akuntansi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa pemerintah harus mengembangkan dan memodernisasi sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung pencatatan. akrual yang lebih efektif. Mengimplementasikan sistem informasi keuangan terpadu yang berbasis akrual dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan memudahkan pencatatan transaksi secara real-time. Fokus utama pengembangan sistem adalah membangun subsistem yang mampu memenuhi kebutuhan pencatatan akrual secara menyeluruh. Ini mencakup pembuatan aplikasi untuk subsistem pendapatan, aset tetap, dan persediaan serta pengembangan aplikasi akuntansi terintegrasi berbasis jaringan dan komputer yang dapat diandalkan dan beroperasi secara real-time (Kusnadi, K. 2016), dan melakukan uji coba sebelum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh dapat membantu menemukan dan mengatasi masalah selama proses implementasi. dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi yang berjenjang kepada seluruh staf pemerintah (Satya, V.E., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tantangan serta strategi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual di tingkat pusat dan daerah. Kombinasi teknik ini memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terkait fenomena yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, analisis dokumen digunakan untuk memeriksa berbagai laporan, kebijakan, dan peraturan serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pemerintah. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi kebijakan yang telah diterapkan serta kendala yang muncul selama proses implementasi. Sejalan dengan pendapat Bowen, G.A. (2009), analisis dokumen merupakan metode yang efektif dalam memahami kebijakan dan praktik organisasi karena memberikan akses terhadap informasi yang stabil, kaya data, serta dapat diverifikasi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, auditor, dan tenaga akuntansi yang terlibat langsung dalam penerapan sistem tersebut. Teknik ini memungkinkan eksplorasi lebih lanjut mengenai pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Menurut Creswell, J.W. (2014), wawancara mendalam merupakan metode yang efektif dalam penelitian kualitatif karena dapat menggali pengalaman subjektif serta memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks social yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini membantu kami memahami secara langsung proses penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, termasuk tantangan teknis dan non- teknis. Metode ini menghasilkan data yang lebih objektif karena memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena secara langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada pandangan responden. Yin, R.K. (2018) menyatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif sangat bermanfaat untuk menangkap dinamika organisasi dan interaksi sosial yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara atau analisis dokumen. Dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data tersebut, Studi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem akuntansi berbasis akrual diterapkan di pemerintahan pusat dan daerah. Metode seperti ini juga membantu dalam menentukan berbagai masalah penting, seperti

keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur TI yang belum memadai, dan resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem akuntansi berbasis akrual melalui peningkatan pelatihan staf, pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang lebih sesuai, dan sosialisasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan sistem akuntansi berbasis akrual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntansi pemerintahan adalah metode pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara menjadi jelas, akuntabel, dan efektif. Pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Implementasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan komitmen pimpinan dalam mendukung perubahan tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2018), hal-hal seperti komitmen terhadap peraturan dan kebijakan, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengelolaan TI yang baik meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kesiapan dan mendukung berbagai komponen untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh lasabuda. (2019), penerapan SAP berbasis akrual mengubah sistem pelaporan keuangan Indonesia secara signifikan, terutama dalam hal pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Pengelolaan aset pemerintah dan laporan keuangan harus disesuaikan karena perubahan ini. Studi ini menyelidiki masalah dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat Dan Daerah

Setelah melakukan analisis menyeluruh baik dari literatur saat ini maupun literatur sebelumnya, menjadi jelas bahwa ada sejumlah masalah penting yang dihadapi pemerintahan Indonesia saat menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan. Salah satu masalah terbesar adalah banyak pegawai pemerintah yang belum sepenuhnya memahami akuntansi berbasis akrual dengan baik. Pemahaman ini sangat penting agar mereka bisa melaksanakan tugas mereka secara efektif. Namun, pelatihan yang ada saat ini masih dianggap terbatas dan tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang dapat memberi bimbingan teknis membuat situasi ini semakin rumit.
2. Hambatan Teknologi dan Sistem Informasi. Infrastruktur teknologi informasi saat ini masih tidak memadai di beberapa tempat. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah seringkali tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem yang sedang berjalan di tingkat pusat. Akibatnya, ada masalah keamanan data dan ketidakstabilan sistem yang sering menghambat penerapan akuntansi berbasis akrual.
3. Kompleksitas Regulasi dan Kebijakan. Regulasi yang mengatur akuntansi berbasis akrual sendiri masih terus mengalami perubahan dan terkadang memerlukan penyesuaian yang cukup signifikan. Selain itu, perbedaan kondisi antara pemerintah pusat dan daerah membuat implementasi regulasi ini tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan

standar akrual yang sudah ditetapkan. Perbedaan kondisi antara pemerintah pusat dan daerah membuat implementasi regulasi ini tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan standar akrual yang sudah ditetapkan.

4. Resistensi terhadap Perubahan. Sejumlah pegawai tampaknya masih sangat nyaman dengan sistem yang lama, yaitu sistem berbasis kas, dan sering kali kurang respon terhadap pergeseran menuju sistem akrual yang lebih modern. Ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dari berbagai pihak tentang manfaat nyata yang bisa dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual. Selain itu, ada juga faktor budaya birokrasi yang cenderung konservatif dalam pencatatan keuangan, sehingga membuat adaptasi ini menjadi lebih lambat

Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

Melaksanakan SAP berbasis akrual di pemerintah pusat dan daerah memerlukan pendekatan yang terencana untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Menurut penelitian dan analisis yang dilakukan, beberapa strategi utama yang akan digunakan:

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Transisi dari sistem yang didasarkan pada kas ke akrual membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengakuan pendapatan, biaya, dan aset yang ada laporan keuangan. Untuk menghadapi tantangan ini, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pejabat yang mengelola keuangan daerah adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Program pelatihan yang terstruktur dan berbasis kompetensi dapat memastikan bahwa pegawai memahami prinsip-prinsip akuntansi akrual serta mampu menerapkannya dalam pencatatan dan laporan keuangan daerah. Di samping itu, sertifikasi profesional juga dapat meningkatkan kualitas standar serta kepercayaan diri pegawai dalam mengelola sistem efisien. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi dan workshop secara rutin pegawai lebih mengerti mekanisme serta keuntungan dari penerapan sistem akrual. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar, sedangkan workshop bisa digunakan untuk memberi pemahaman praktis melalui simulasi dan studi kasus. Dengan cara ini, pegawai diharapkan dapat lebih memahami bagaimana sistem akrual berfungsi dalam berbagai situasi keuangan daerah. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia adalah bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya dapat menyediakan kursus pelatihan yang sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintah dan menawarkan program pendidikan yang berkelanjutan untuk pegawai pemerintah daerah. Selain itu, penelitian dan penelitian akademis dapat dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti tentang penerapan akuntansi akrual. Dengan melakukan kerja sama ini, diharapkan pegawai pemerintah daerah akan lebih siap untuk mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual, yang akan membuat laporan keuangan lebih jelas, akuntabel.

Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi

Pemerintah daerah seharusnya mengembangkan sistem informasi akuntansi yang didasarkan pada akrual dan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Keterkaitan ini akan mempermudah proses pencatatan transaksi secara otomatis dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual dalam laporan keuangan. Dengan sistem terpadu, setiap unit kerja mampu mengakses informasi keuangan secara langsung,

sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, sistem tersebut juga memberikan peluang untuk mengkonsolidasikan data keuangan antar berbagai instansi dalam satu platform, sehingga mempercepat proses audit dan evaluasi. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi informasi adalah langkah krusial dalam mendukung pelaksanaan akuntansi akrual. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa jaringan internet yang andal tersedia serta perangkat lunak yang sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Pengadaan perangkat keras yang tepat, seperti server berkapasitas besar dan komputer dengan spesifikasi tinggi, juga harus menjadi prioritas agar sistem dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, pelatihan untuk staf IT di lingkungan pemerintah daerah perlu dilakukan agar mereka dapat mengelola dan merawat sistem informasi tersebut secara efektif. Ketiga, peningkatan perlindungan informasi dan sistem backup merupakan elemen penting untuk menjaga keutuhan data akuntansi berbasis akrual. Pemerintah daerah perlu menerapkan standar proteksi yang tinggi untuk melindungi sistem dari ancaman siber, seperti peretasan dan perangkat lunak berbahaya. Penggunaan firewall, enkripsi data, serta autentikasi ganda untuk pengguna sistem harus diimplementasikan guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Di samping itu, penerapan sistem backup yang rutin harus dilakukan untuk menghindari kehilangan data akibat masalah teknis atau bencana. Data keuangan harus disimpan dalam server cadangan yang aman dan dapat dipulihkan dengan cepat bila terjadi gangguan. Dengan menerapkan strategi ini, pemerintah daerah dapat menghadapi tantangan keterbatasan teknologi dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur TI yang handal, serta perlindungan data yang solid akan memastikan pelaksanaan akuntansi akrual berlangsung dengan lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai hukum.

Penyelarasan Regulasi dan Kebijakan

Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintahan daerah membutuhkan penyelarasan regulasi dan kebijakan. Ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan regulasi daerah menghalangi penerapan akuntansi berbasis akrual. Ini adalah salah satu hambatan utama yang sering muncul. Pencatatan, laporan keuangan, dan evaluasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah dapat berubah karena ketidaksesuaian aturan. Akibatnya, agar sistem akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah, pendekatan yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Peraturan daerah yang lebih rinci dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Pemerintah daerah diharuskan menetapkan peraturan yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang berlaku sejalan dengan kebijakan nasional sambil mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Peraturan yang lebih terperinci juga akan membantu pegawai memahami dan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual lebih baik. Selain itu, peningkatan kerja sama antara otoritas lokal dan pemerintah pusat dalam menghubungkan kebijakan akuntansi adalah langkah penting lainnya. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, harus beroperasi untuk memberikan nasihat dan mendukung pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi mereka. Forum media periodik, seperti koordinasi dan diskusi teknis, dapat menjadi metode yang efektif untuk mengakhiri perjanjian dan menyelesaikan perbedaan dalam kebijakan antara pusat dan wilayah. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan akuntansi yang diterapkan di daerah akan lebih cocok untuk standar nasional, sehingga memfasilitasi konsolidasi laporan keuangan di tingkat pusat.

Selanjutnya, penting untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi secara berkala sehingga kebijakan yang ada tetap relevan dengan perkembangan dalam system keuangan

publik. Kebijakan di sektor akuntansi dan keuangan negara senantiasa berubah untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan analisis secara rutin untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku masih memenuhi kebutuhan saat ini. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui studi perbandingan dengan daerah lain, masukan dari auditor, akademisi, atau melalui audit kebijakan oleh lembaga pengawas keuangan. Dengan melaksanakan strategi tersebut, diharapkan pemerintah daerah akan lebih mudah untuk menyelaraskan regulasi mereka dengan kebijakan nasional, sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual dapat berlangsung dengan lebih efektif, konsisten, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan Kepala Daerah

Dukungan dari pemimpin daerah memainkan peran vital dalam menjamin sukses penerapan sistem akuntansi yang berbasis akrual di sektor pemerintahan lokal. Adanya komitmen yang mantap dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mengubah sistem akuntansi dari kas menjadi akrual, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab keuangan daerah. Pemimpin daerah memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan strategis, mendistribusikan sumber daya, serta menjamin bahwa semua unsur pemerintah menjalankan sistem ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepemimpinan yang tegas, perubahan dalam akuntansi ini dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan dari instansi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem baru. Oleh karena itu, beberapa pendekatan dapat diterapkan untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Salah satu pendekatan terpenting adalah menambah wawasan pemimpin daerah mengenai keuntungan akuntansi berbasis akrual. Kepala daerah perlu mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana sistem ini bisa memberikan gambaran keuangan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap manajemen keuangan daerah. Pengetahuan ini dapat disampaikan melalui sosialisasi, seminar, serta kunjungan studi ke daerah yang telah sukses menerapkan sistem ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kepala daerah akan jadi lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan memastikan bahwa semua pihak dalam pemerintahan memahaminya dan menerapkannya secara maksimal. Di samping itu, kepala daerah juga perlu terlibat langsung dalam pengawasan penerapan sistem ini. Penerapan akuntansi berbasis akrual tidak hanya membutuhkan kebijakan yang jelas, tetapi juga pengawasan yang berkelanjutan. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah membentuk tim pengawas atau unit tugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan sistem ini.

Evaluasi secara berkala terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem akrual sangat diperlukan, agar solusi yang tepat bisa segera diambil. Kepala daerah juga bisa mengadakan pertemuan koordinasi rutin dengan instansi terkait untuk menjamin keselarasan kebijakan dan memantau efektivitas sistem yang sedang berjalan. Lebih jauh, reformasi akuntansi berbasis akrual seharusnya menjadi bagian dari strategi manajemen pemerintahan daerah. Pelaksanaan sistem ini harus tersemat dalam kebijakan pengembangan daerah, termasuk dalam perencanaan anggaran, pengawasan keuangan, serta sistem kontrol internal. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan transparansi keuangan daerah, tetapi juga memperkuat prinsip pengelolaan yang baik dalam manajemen keuangan publik. Dengan menjadikan reformasi akuntansi sebagai elemen dari strategi manajemen pemerintahan yang lebih luas, pemerintah daerah akan dapat memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan sistem ini. Berkat penerapan metode ini, direktur regional harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk mendukung aplikasi akuntansi berdasarkan akumulasi. Mimpi yang efektif akan mendorong semua faktor pemerintah untuk lebih disiplin dalam

mengimplementasikan sistem ini, untuk mengelola keuangan regional menjadi lebih transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah saat ini.

Evaluasi dan Observing Berkala

Evaluasi secara berkala adalah langkah penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan system akuntansi yang berbasis akrual berlangsung sesuai harapan dan dapat diperbaiki apabila muncul masalah yang menghalangi efektivitasnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana sistem telah diimplementasikan dengan baik, mengidentifikasi kendala yang ada, serta merancang langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk menambah transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tanpa evaluasi yang terstruktur, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam menemukan masalah yang muncul serta akan kekurangan dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, berbagai strategi evaluasi bisa diterapkan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. Salah satu strategi yang bisa dilaksanakan adalah membentuk tim evaluasi internal yang fokus pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan audit internal pada penggunaan sistem akuntansi, memastikan bahwa pencatatan keuangan selaras dengan standar akuntansi yang ditetapkan pemerintahan, serta mengenali tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Tim evaluasi internal dapat terdiri dari wakil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan auditor internal lainnya yang memiliki keahlian di bidang akuntansi pemerintahan.

Dengan terbentuknya tim khusus untuk evaluasi ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam mendeteksi masalah serta merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan akrual. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam memastikan akurasi dan efisiensi pencatatan serta pelaporan keuangan. Oleh karena itu, sangat krusial untuk mengevaluasi sistem yang ada agar sesuai dengan kebutuhan akuntansi berbasis akrual, memiliki fitur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat digunakan dengan baik oleh pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa sistem informasi yang diterapkan masih memiliki keterbatasan, pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan pembaruan sistem atau memberikan pelatihan lanjutan bagi pegawai agar mereka dapat memanfaatkan sistem dengan lebih efektif. Hasil dari evaluasi ini harus dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

Evaluasi tidak sekadar formalitas, melainkan harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Setiap temuan dari evaluasi perlu diikuti dengan rencana aksi yang jelas, baik terkait penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pembaruan sistem informasi yang digunakan. Selanjutnya, hasil evaluasi juga dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Dengan mengadopsi pendekatan evaluasi yang terstruktur dan berkesinambungan, instansi pemerintah lokal dapat memastikan pelaksanaan akuntansi yang berbasis akrual berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Penilaian yang dilakukan secara teratur akan mendukung dalam mengidentifikasi kekurangan dalam sistem, memperbaiki kendala yang ada, serta memastikan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual mampu memberikan keuntungan optimal dalam meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang muncul mencakup keterbatasan dalam sumber daya manusia, permasalahan pada infrastruktur teknologi informasi, regulasi yang masih perlu disesuaikan, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Semua faktor tersebut menjadi penghalang utama dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan strategi yang menyeluruh dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan dalam penelitian ini meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pembaruan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung integrasi sistem akuntansi, serta penyesuaian regulasi agar sejalan dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, dukungan dari pemimpin daerah memegang peran krusial dalam memastikan penerapan sistem ini berjalan dengan optimal. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Secara keseluruhan, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada serta penerapan strategi yang tepat guna memastikan proses implementasinya berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfiansyah, A. (2015). Strategi implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kota "S"). *Jurnal NeO-Bis*, 9(1), 1-19. <https://ejournal.neobis.com/asfiansyah2015>
- BINUS Accounting. (2017, Juni 17). Tantangan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/tantangan-keberhasilan-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual/>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). Penerapan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3750-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual-untuk->
- Inspektorat Kota Magelang. (2015). Tantangan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. <https://inspektorat.magelangkota.go.id/tantangan-keberhasilan-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual/>
- Kusnadi, K., Siregar, H., & Ristiyanto, N. (2016). Strategi implementasi akuntansi basis akrual di Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1-17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24829
- Kusnadi, K., Siregar, H., & Ristiyanto, N. (2016). Strategi implementasi akuntansi basis akrual di Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1-17. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/24829>
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 1-10. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam/article/view/100>

- Maula, F. (2017). Evaluasi dan tantangan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud pencapaian good governance (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. Repositori UIN Alauddin Makassar. <https://repositori.uinalauddin.ac.id/9669/1/Fadlan%20Maula.pdf>
- Risnaningsih. (2016). Implementasi dan kendala sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. EKSIS, 11(2), 178–208. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Satya, V. E. (2020). Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat. Kajian, 25(2), 145-160. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/3881/1112>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK), 6(1), 68–72. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/meningkatkan-akurasi-laporan-keuangan.html>